

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Arzika Putri, Junia Farma

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda

ARTICLE HISTORY

Received : 30 Agustus 2024

Revised: 25 November 2024

Accepted : 01 December 2024

KEYWORDS

Transparency, Accountability, Direct Cash Assistance, Village Funds.

CORRESPONDENSI

Nama : Junia Farma

Email : juniafarma@ar-raniry.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) is one of the government's efforts to overcome poverty in the regions, especially in villages. However, the implementation of this program is often faced with various challenges, including the problem of transparency and accountability in fund management. This study aims to determine the effect of transparency and accountability on the management of village fund direct cash assistance from an Islamic economic perspective in Nisam District, Aceh Utara Regency. The research method applied is a quantitative method using multiple regression analysis. The respondents in this study were village officials in Nisam District totaling 80 people. The results of the study indicate that the transparency variable has a positive and significant effect on the management of BLT-DD partially. Likewise, the accountability variable partially shows a positive and significant effect on the management of BLT-DD. In addition, transparency and accountability simultaneously have a positive and significant effect on the management of BLT-DD, with a Determination Coefficient (R^2) value of 38. This study is expected to be a reference for policy makers in improving village fund governance effectively and efficiently. In addition, this study can help village officials understand the importance of transparency and accountability in increasing public trust in government programs. Therefore, stricter training and supervision is needed for village officials in terms of financial management based on Islamic principles.

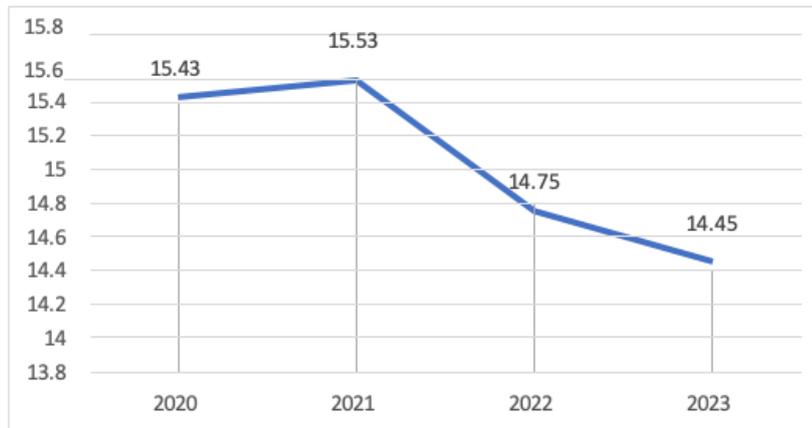
Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah global yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia (Wulansari et al., 2023). Secara umum, kemiskinan tidak hanya melibatkan kekurangan ekonomi, Namun juga mencakup kelompok atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan (Hajra, 2022). Di Indonesia, kemiskinan kerap menjadi isu sosial dan ekonomi yang memerlukan perhatian lebih. Data Badan Pusat Statistik 2023 menampilkan bahwa di Indonesia, tingkat kemiskinan perkotaan hanya sebesar 7,29% lebih rendah dibandingkan daerah pedesaan yang mencapai 12,22%.

Salah satu provinsi yang menghadapi tantangan besar dalam menurunkan angka kemiskinan adalah Aceh, meskipun provinsi ini kaya akan sumber daya alam (Rahman et al., 2024). Masalah kemiskinan di Aceh merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dan mendalam dari berbagai pihak. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di

Aceh masih cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa pembangunan ekonomi yang telah dilakukan belum sepenuhnya berhasil menjangkau semua lapisan masyarakat.

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh



Berdasarkan Gambar di atas, dapat dilihat tren penduduk miskin di Provinsi Aceh dari tahun 2020 hingga 2023. Penduduk miskin di Aceh pada tahun 2020 tercatat sebesar 15.43%. Terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2021, dimana angka kemiskinan mencapai 15.53%. Namun, sejak tahun 2022, terlihat adanya penurunan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan. Angka ini turun menjadi 14.75% pada tahun 2022, dan terus menurun hingga mencapai 14.45% pada tahun 2023. Meskipun tren penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh, angka tersebut masih relatif tinggi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui program bantuan sosial untuk menghambat peningkatan angka kemiskinan terutama di pedesaan. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan program yang berlandaskan pada Peraturan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019. BLT-DD dirancang sebagai bantuan sosial tunai yang disalurkan langsung kepada masyarakat desa yang memenuhi kriteria tertentu. Program ini bertujuan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan (Maheswary et al., 2022).

Keberhasilan program BLT-DD ini sangat bergantung pada pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel (Podungge et al., 2023). Program ini menggunakan dana publik dari dana desa, sehingga penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan didistribusikan. Transparansi menurut Edowati et al., (2021) ialah penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan jujur pada masyarakat dengan dasar bahwa masyarakat berhak tahu kegiatan pemerintah dalam mengelola sumber daya. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep transparansi tidak hanya melibatkan keterbukaan informasi semata, tetapi juga bersandar pada nilai kejujuran (Amalia & Widiastuti, 2020). Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam penyampaian informasi, di mana pihak yang memberikan informasi bertanggung jawab untuk menyampaikan segala hal secara jujur tanpa menutupi apa pun dari penerima, termasuk kebijakan-

kebijakan yang diambil. Perspektif ini menekankan pada prinsip bahwa setiap individu, terutama yang memiliki peran sebagai pemberi amanah kepada masyarakat, harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Penelitian yang dilakukan oleh [Suyoto & Oktafia \(2023\)](#) mengatakan bahwasanya variabel transparansi berpengaruh signifikan pada Pengelolaan BLT-DD.

Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pimpinan atau pemimpin organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban secara jelas terhadap hasil dari tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berhak atau berwenang ([Adrianti et al., 2023](#)). Penerapan asas akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD merupakan pelengkap penting dari transparansi. Jika transparansi menekankan keterbukaan informasi, akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Artinya, pemerintah desa harus siap memberikan penjelasan dan laporan kepada masyarakat tentang penggunaan dan distribusi dana setelah informasi program BLT-DD dipublikasikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, akuntabilitas adalah wujud tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi kepada Allah SWT ([Nasirwan, 2017](#)). Konsep ini berlandaskan pada keyakinan bahwa segala hal yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia adalah amanah, sehingga setiap tindakan dan perbuatan manusia kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Penelitian yang dilakukan oleh [Daud et al., \(2022\)](#) mengatakan bahwasanya variabel akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD.

Kecamatan Nisam, yang terletak di Aceh Utara merupakan salah satu daerah yang menjalankan program BLT-DD. Kecamatan ini terdiri dari 29 desa/kelurahan. Berdasarkan pernyataan dari Bapak M selaku Keuchik Meunasah Meucat mengatakan bahwa pada awalnya anggaran yang dialokasikan untuk program BLT-DD mencapai 15-25% dari total anggaran Dana Desa. Namun, pada tahun 2024 tidak ada lagi batas minimum yang harus disalurkan. Desa diberi kebebasan untuk menentukan berapa yang akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dengan batas maksimum tetap yaitu 25% dari Dana Desa. Aturan tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan adanya indikasi yang mencerminkan ketidakefisienan dalam pengelolaan dana BLT-DD. Peneliti menemukan seorang lansia perempuan yang menjadi kepala keluarga di keluarganya yang tinggal bersama dua anaknya. Lansia tersebut tidak lagi bekerja karena kondisi fisik yang sudah tidak mendukung lagi mendapatkan penghasilan. Sementara itu, kedua anaknya juga tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga hidup mereka sangat bergantung kepada pemberian orang lain. Namun, meskipun memenuhi kriteria penerima bantuan, keluarga ini tidak mendapatkan BLT-DD. Selain itu, di beberapa desa tidak ditemukan adanya papan informasi mengenai daftar penerima BLT-DD.

Meskipun dana desa dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu, implementasinya sering kali terhambat oleh isu transparansi dan akuntabilitas. Meskipun transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam pengelolaan dana desa,

penelitian sebelumnya belum banyak membahas bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan BLT-DD. Penelitian ini akan menutup gap tersebut dengan menganalisis pengelolaan BLT-DD melalui lensa ekonomi Islam, yang melibatkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan dana desa. Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi pengelolaan BLT-DD, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa penelitian yang sama sudah pernah dilakukan, seperti penelitian [Daud et al., \(2022\)](#), meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BLT-DD di Kabupaten Bireun. Selanjutnya penelitian [Anggeli & Andayani \(2024\)](#) dan [Ate et al., \(2023\)](#) yang meneliti peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian lainnya dilakukan oleh [Edelwis \(2024\)](#), meneliti peran transparansi pada pengelolaan dana Desa Puain Kanan. Berikutnya penelitan [Making & Handayani \(2021\)](#) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan BLT-DD dari sudut pandang ekonomi Islam. Hal ini menjadikan penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan tata kelola dana desa secara bijaksana. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman aparat desa memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat bagi aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian merupakan perangkat desa yang berjumlah 260 orang. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menggunakan kriteria tertentu [Sugiyono \(2016\)](#). Mengacu pada rumus slovin, maka diperoleh sampel pada penelitian ini sebanyak 80 orang yang terdiri dari kepala desa, kepala dusun, tuha peut, sekretaris/bendahara, dan operator. Hal ini dikarenakan mereka adalah orang terlibat langsung dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai.

Adapun data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada 80 perangkat desa sebagai responden. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi dan literatur terkait pengelolaan BLT-DD, transparansi, dan akuntabilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan BLT-DD. Sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik dan uji heteroskedastisitas, agar meyakinkan bahwa model regresi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Nisam merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Nisam memiliki luas wilayah sebesar 193,47 km² atau 19.347 hektar. Ibu kota Kecamatan Nisam adalah Keude Amplah. Secara administratif, Kecamatan Nisam terbagi menjadi 3 kemukiman dan 29 gampong (desa). Secara geografis, Kecamatan Nisam berbatasan dengan beberapa kecamatan di sekitarnya, seperti bagian utara dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Dewantara dan Nisam Antara. Adapun dibagian barat dan timur berbatasan dengan Kecamatan Banda Baro dan Kuta Makmur.

Dalam penelitian ini, terdapat 80 orang perangkat desa dari 12 desa di Kecamatan Nisam yang menjadi responden. Kuesioner disebarikan kepada 80 responden tersebut dan semuanya kembali dengan lengkap, sehingga data dapat diolah lebih lanjut. Profil responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, tempat tinggal, tingkat pendidikan terakhir, serta posisi atau jabatan yang dipegang.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-Laki	65
	Perempuan	15
Alamat	Alue Bili	7
	Binjee	9
	Blang Dalam Tunong	7
	Blang Karieng	9
	Gampong Teungoh	6
	Meunasah Beunot	6
	Meunasah Meucat	6
	Meunasah Rayeuk	6
	Paloh Kayee Kunyet	6
	Paloh Mampree	5
	Tingkeum	7
	SD/Sederajat	1
Pendidikan	SLTP/Sederajat	14
	SLTA/Sederajat	43
	Diploma 4/Strata 1	22
	Kepala Desa	12
Jabatan	Kepala Dusun	34
	Tuha Peut	28
	Operator	4
	Sekretaris/Bendahara	2

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan pada Tabel 1, dapat dilihat bahwasanya mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwasanya laki-laki lebih dominan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai perangkat desa. Desa Binjee dan Blang Karieng memiliki jumlah responden tertinggi berdasarkan alamat. Berdasarkan tingkat

pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan SLTA/Sederejat. Jika dilihat dari segi jabatan, mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki jabatan sebagai kepala dusun

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Transparans	X1	0,718	0,2199	Valid
	X2	0,790		
	X3	0,614		
	X4	0,673		
	X5	0,562		
	X6	0,513		
	X7	0,537		
	X8	0,727		
	X9	0,349		
	X10	0,688		
	X11	0,632		
Akuntabilitas	X1	0,744	0,2199	Valid
	X2	0,712		
	X3	0,707		
	X4	0,615		
	X5	0,658		
	X6	0,705		
	X7	0,741		
	X8	0,706		
	X9	0,641		
	X10	0,626		
	X11	0,614		
Pengelolaan BLT-DD	Y1	0,461	0,2199	Valid
	Y2	0,496		
	Y3	0,802		
	Y4	0,637		
	Y5	0,699		
	Y6	0,578		
	Y7	0,697		
	Y8	0,705		
	Y9	0,569		
	Y10	0,727		

Sumber: Data Diolah (2024)

Sebuah kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengelolaan BLT-DD memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel, sehingga seluruh pernyataan dalam kuesioner dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Items	Keterangan
Transparansi (X1)	0,824	11	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,884	11	Reliabel
Pengelolaan BLT- DD (Y)	0.835	10	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 3 menampilkan semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha yang melebihi 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel dan instrumen tersebut konsisten dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.98816114
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.069
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan pengujian normalitas dapat disimpulkan bahwa data yang diteliti telah memenuhi asumsi normalitas. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi 0.200 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	7,369	4,756		1,549	0,125

Transparansi	0,367	0,118	0,303	3,098	0,003
Akuntabilitas	0,428	0,096	0,434	4,438	0,000

a. Dependent Variable: Pengelolaan BLT-DD

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil di atas dapat diformulasikan persamaan regresi linier berganda seperti berikut:

$$Y = 7.369 + 0.367X_1 + 0.428X_2 + \varepsilon.$$

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.624 ^a	.389	.373	4.040

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data Diolah (2024)

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh berdasarkan Tabel 6 sebesar 0.389. Hal ini mengindikasikan bahwa 38.9% variasi dalam pengelolaan BLT-DD dapat dijelaskan oleh variabel transparansi dan akuntabilitas. Adapun sisanya sebesar 61.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diangkat pada penelitian ini.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan BLT-DD Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,098 > 1,991$) dan nilai signifikansi 0,003 yang lebih rendah dari 0,05. Adapun koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,367, menunjukkan kontribusi positif transparansi terhadap pengelolaan BLT-DD. Maka dapat diartikan jika terjadi peningkatan satu satuan pada variabel transparansi, maka akan meningkatkan pengelolaan BLT-DD di Kecamatan Nisam sebesar 0.367 satuan atau setara dengan 36.7%. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat transparansi dalam pengelolaan BLT-DD akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan tersebut. Hasil kajian ini sesuai dengan temuan yang diungkapkan oleh [Daud et al \(2022\)](#), menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan BLT-DD.

Dalam ekonomi Islam, transparansi merupakan prinsip penting yang harus diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk ketika mengelola program bantuan sosial seperti BLT-DD ([Setiawan, 2023](#)). Transparansi erat kaitannya dengan sifat *siddiq* atau

jujur, yang yang harus dimiliki oleh setiap muslim, termasuk mereka yang terlibat dalam pengelolaan program-program pemerintah. Al-Quran surat Al-Maidah (5) ayat 8 mengajarkan bahwa dalam segala tindakan, termasuk pengelolaan dana, seseorang harus selalu berpegang pada keadilan dan transparansi, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan luar. Kejujuran dalam menyampaikan informasi dan melaksanakan kewajiban merupakan bentuk dari *siddiq* yang diharapkan dalam pengelolaan BLT-DD. Dengan kata lain, ayat tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan sebagai landasan dalam menjalankan amanah serta menjaga integritas dalam setiap aspek pengelolaan, termasuk dalam konteks keuangan publik. Sejalan dengan prinsip ini, transparansi dalam pengelolaan BLT-DD diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, namun juga merefleksikan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam prinsip ekonomi Islam. Transparansi dalam pengelolaan BLT-DD tidak hanya penting dalam perspektif ekonomi Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi akan mendorong akuntabilitas pemerintah desa, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau korupsi (Rosidah et al., 2023).

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan BLT-DD Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

Variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD di Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t* hitung lebih besar dari *t* tabel ($4,438 > 1,991$) dan nilai signifikansi yang lebih rendah dari 0,05. Adapun nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,428 menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan BLT-DD di Kecamatan Nisam sebesar 0,428 satuan atau setara dengan 42,8%. Temuan ini konsisten dengan penelitian Suyoto & Oktafia (2023), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berdampak positif pada perilaku pengelolaan BLT-DD.

Akuntabilitas merujuk pada keharusan para pengelola untuk menyampaikan laporan, bertanggung jawab, dan bersikap transparan terhadap pengelolaan dana yang dipercayakan kepada mereka (Meilina et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan BLT-DD di Kecamatan Nisam, tingginya nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan BLT-DD.

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*al-mas'uliyah*) merupakan hal yang sangat penting. Islam menekankan bahwa setiap individu atau lembaga memiliki tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak (Waluya & Mulauddin, 2020). Dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 ditekankan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks pengelolaan dana publik, prinsip ini mengharuskan pengelola dana untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan masyarakat.

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan BLT-DD Menurut Kajian Ekonomi Islam di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

kedua variabel independen secara bersama-sama ikut mempengaruhi variabel dependen, dikarenakan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($24.523 > 3.96$). Uji R Square dalam penelitian ini menghasilkan nilai 0.389, yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi pengelolaan BLT-DD sebesar 38,9%, sementara sisanya 61,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diangkat. Temuan ini sejalan dengan [Suyoto & Oktafia \(2023\)](#), menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara bersama mempengaruhi pengelolaan BLT-DD. Penelitian ini menegaskan bahwa kedua variabel tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BLT-DD.

Dalam perspektif ekonomi Islam, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran krusial dalam memastikan pengelolaan dana dilakukan dengan cara yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah ([Putri et al., 2024](#)). Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menilai bagaimana dana BLT-DD dikelola. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik tetapi juga mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam Islam, prinsip transparansi sejalan dengan ajaran untuk bersikap jujur dan terbuka dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dana yang bersifat publik. Namun, penerapan prinsip transparansi di Kecamatan Nisam belum sepenuhnya optimal. Beberapa desa di Kecamatan Nisam tidak memiliki papan informasi mengenai anggaran desa dan daftar penerima BLT, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh informasi yang diperlukan ([Yunus, 2016](#)).

Akuntabilitas mencakup tanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan BLT-DD. Hal ini melibatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai bagaimana dana tersebut digunakan dan hasil yang dicapai. Pemerintah desa di Kecamatan Nisam telah mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan penggunaan dana BLT-DD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, transparansi secara individu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa transparansi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BLT-DD. Dengan adanya transparansi, masyarakat dan pihak terkait dapat memantau dengan jelas bagaimana dana tersebut dikelola dan disalurkan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan efektivitas pelaksanaan program bantuan. Kedua, akuntabilitas juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD. Pengaruh ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memastikan pengelolaan BLT-DD dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika pihak pengelola dapat mempertanggungjawabkan setiap aspek dari penggunaan dana, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara transparansi dan akuntabilitas dapat secara efektif meningkatkan pengelolaan BLT-DD. Ketika kedua faktor ini diterapkan secara bersama-sama, mereka saling melengkapi dan memperkuat proses pengelolaan, sehingga program BLT-DD dapat berjalan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengangkat dua variabel independen saja yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam mempengaruhi pengelolaan BLT-DD. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya seperti variabel pengawasan, kompetensi, partisipasi atau variabel lainnya.

Daftar Pustaka

- Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Gowa. *Income Journal.*, 2(1), 33–44.
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzaki membayar zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756–1769.
- Ate, J. H., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 4(1), 20–25.
- Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022a). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 133–143.
- Edelwis, A. (2024). Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 7(1), 291–310.
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Hajra, S. (2022). *Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Perspektif Ekonomi* [Doctoral dissertation]. IAIN Parepare.
- Maheswary, D. M., Pusparini, H., & Suryantara, A. B. (2022). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kekait. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 123–135.
- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*

(*JIRA*), 10(10).

- Nasirwan, M. M. R. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen). *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*.
- Podungge, A. W., Podungge, A. M., & Solihin, D. I. Y. (2023). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Balahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik*, 3(2), 1–13.
- Putri, R. N., Febrian, A., Damayanti, K., & Martanti, M. (2024). Peran Etika Bisnis Dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 11–20.
- Rahman, D. A., bin Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 183–194.
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156.
- Setiawan, N. (2023). Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Pencegahan terhadap Fraud. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 21–32.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Suyoto, A. W. S. W., & Oktafia, R. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Blt-Desa 40% Pada Masa Pandemi Di Desa Sedayulawas. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 32–41.
- Waluya, A. H., & Mulauddin, A. (2020). Akuntansi: akuntabilitas dan transparansi dalam qs. al baqarah (2): 282-284. *Muamalatuna*, 12(2), 15–35.
- Wulansari, R. Y., Fadhilah, N., Huda, M., Abidin, A. Z., & Sujianto, A. E. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(1), 82–95.
- Yunus, N. R. (2016). Menciptakan good and clean government berbasis Syariah Islamiyah dalam tatakelola pemerintahan Republik Indonesia. *Nur El-Islam*, 3(1), 143–175.